

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini berisikan kajian teoritis mengenai ruang lingkup Literasi Keuangan (X_1), Inklusi Keuangan (X_2) dan Kinerja UMKM (Y) khususnya menjelaskan pengertian dan indikator variabel penelitian yang akan dikaji secara mendalam.

2.1.1 Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh pelaku UMKM khususnya dari segi pengetahuannya dalam mengelola keuangan prbadimaupun usaha.

2.1.1.1 Pengertian Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan sebagai keahlian yang dimiliki individu juga kemampuannya untuk mengelola pendapatannya sehingga meningkatkan kesejahteraan finansial (Huston, 2010: 78). Literasi keuangan merupakan kemampuan dalam mengelola uang menganalisis, membaca, dan komunikasi tentang pengalokasian pada sumber daya keuangan guna mencapai tingkat kesejahteraan dan pengambilan keputusan ekonomi secara tepat Vitt, et al Dalam (shaari, et al, 2013: 280)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan bahwa literasi keuangan ialah pengetahuan, maupun keterampilan dan keyakinan yang dipengaruhi oleh

sikap juga perilaku yang dapat meningkatkan kualitas dalam mengambil keputusan, pengelolaan keuangan.

Dapat disimpulkan maka literasi keuangan menerapkan pengetahuan dan juga pemahaman yang dimiliki dalam membuat keputusan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi.

2.1.1.2 Tujuan Literasi Keuangan

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen juga Masyarakat, tujuan dari literasi keuangan diantaranya meliputi :

1. Peningkatan kualitas juga pengambilan keputusan keuangan individu.
2. Perubahan pada sikap dan perilaku individu dalam mengelola keuangan menjadi lebih baik, agar mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Dalam hal ini OJK menyatakan misi penting dari program literasi keuangan yaitu dengan melakukan edukasi dibidang keuangan kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya mengelola keuangan secara cerdas maupun baik, mampu untuk meningkatkan pengetahuan tentang industri keuangan agar seluruh masyarakat tidak akan mudah untuk dibodohi atau tertipu oleh produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka waktu pendek tanpa mempertimbangkan risiko yang akan datang.

2.1.1.3 Prinsip Dasar Literasi Keuangan

Pada prinsip dasar literasi keuangan yang terdapat dalam SNLKI (2017) antara lain:

1. Terencana dan terukur

Dalam beberapa kegiatan yang dilakukan dengan memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran atau pun kebijakan otoritas dan kebijakan perilaku memiliki indikator yang memperoleh informasi dalam peningkatan literasi keuangan.

2. Berorientasi pada pencapaian

Dilakukan hingga mampu mencapai tujuan dalam peningkatan literasi keuangan dengan secara optimal dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada.

3. Berkelanjutan

Untuk mencapai suatu tujuan yang sudah direncanakan juga memiliki aspek jangka panjang pelaku usaha jasa keuangan tentunya perlu mengutamakan pengelolaan lembaga juga produk layanan jasa keuangan.

4. Kolaborasi

Melibatkan seluruh pelaku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama.

2.1.1.4 Manfaat Literasi Keuangan

Manfaat literasi keuangan menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2016) antara lain:

1. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan serta memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan

keuangan dengan lebih baik.

2. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.
3. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan.

Maka untuk lebih mengedukasi masyarakat agar semakin mengerti di berbagai keuangan OJK dengan merencanakan tiga pilar dalam program strategi nasional literasi. Diantaranya : mengedepankan program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. Membentuk penguatan infrastruktur literasi keuangan dan pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau.

2.1.1.5 Klasifikasi dan Tingkat Literasi Keuangan

Berdasarkan survey bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia terdapat diantaranya sebagai berikut (OJK, 2013):

1. *Well literate*, yang memiliki pengetahuan juga keyakinan tentang lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. *Sufficient literate*, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan.
3. *Less literate*, memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk, jasa keuangan.
4. *Not literate*, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga dan jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan.

2.1.1.6 Indikator Literasi Keuangan

Adapun Indikator Literasi Keuangan diantaranya adalah (Mendari dan Kewal, 2013):

1. Pengetahuan dasar pengelolaan keuangan

Meliputi pemahaman akan beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi.

2. Tabungan

Merupakan bagian yang meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan Tabungan seperti penggunaan kartu kredit.

3. Asuransi

Merupakan bagian yang meliputi pengetahuan dasar asuransi dan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi kendaraan bermotor.

4. Investasi

Bagian ini meliputi pengetahuan tentang suku bunga pasar, reksadana, dan risiko investasi.

2.1.2 Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan akan solusi keuangan misalnya mengenai pembiayaan modal kerja dan lainnya.

2.1.2.1 Pengertian Inklusi Keuangan

Definisi inklusi keuangan secara umum adalah istilah sistem inklusi keuangan merupakan bahasa Inggris Inklusi Keuangan yang bersinonim dengan

inclusive financial system yang merupakan sistem jasa keuangan yang sifatnya universal, yang berarti sistem jasa keuangan mampu menjangkau semua kalangan.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, inklusi keuangan ialah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.2 Kebijakan Inklusi Keuangan

Kebijakan keuangan inklusif mencangkup pilar dan fondasi SNKI beserta indikatornya yang didukung koordinasi antar kementerian atau lembaga atau instansi terkait, serta dilengkapi dengan aksi keuangan inklusif. Berikut pilar dari kebijakan inklusi keuangan yang dimaksud diantaranya:

1. Pilar Edukasi Keuangan

Edukasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

2. Pilar Hak Properti Masyarakat

Hak property masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal

3. Pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan

Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

4. Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Layanan keuangan pada sektor Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara nontunai.

5. Pilar Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

2.1.2.3 Indikator Inklusi Keuangan

Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan inklusi keuangan (Bank Indonesia, 2014), yaitu :

1. Ketersedian/akses : mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
2. Penggunaan : mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan).
3. Kualitas : mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah

memenuhi kebutuhan pelanggan.

4. Kesejahteraan : mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.

2.1.2.4 Strategi Nasional Inklusi Keuangan

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 strategi Nasional Keuangan Inklusif membagi strategi inklusi keuangan diantaranya menjadi 5 pilar yaitu :

1. Edukasi keuangan berupaya untuk bisa meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat atas produk serta jasa keuangan yang berada didalam pasar keuangan yang formal.
2. Hak Properti Masyarakat, banyaknya masyarakat yang tidak dapat melakukan pinjaman dilembaga keuangan formal karena pinjaman formal pada umumnya mengharuskan memberikan jaminan berupa asset yang dimiliki.
3. Fasilitas Intermediasi dan saluran Distribusi Keuangan, infrastruktur yang kurang merata di Indonesia sering kali menjadi hambatan masuknya masyarakat dalam lembaga keuangan formal.
4. Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah, pada pilar ini bertujuan dalam meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara non tunai.
5. Perlindungan Konsumen, Pilar terakhir ini bertujuan untuk memberikan rasa aman pada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta mempunyai prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan.

2.1.3 Kinerja UMKM

Kinerja UMKM adalah suatu pencapaian dalam usaha berupa naiknya pertumbuhan laba, pangsa pasar, akses terhadap penjual dan pembeli sampai pada memulai usaha kembali.

2.1.3.1 Pengertian Kinerja UMKM

Kinerja disini sendiri adalah capaian yang akan diperoleh seseorang maupun perusahaan yang akan mencapai dalam suatu tujuan tertentu. PP No.7 Tahun 2021 Beri Banyak Kemudahan Untuk Koperasi dan UMKM. PP No. 7 Tahun 2021 memuat berbagai aturan kebijakan pada aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM.

Kinerja UMKM adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu (Hasibuan dalam Dinar, 2017: 9). Kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang di capai oleh seorang individu dan dapat diselesaikan dengan tugas individu tersebut didalam UMKM pada suatu periode tertentu, dan akan dihubungkan dengan ukuran nilai atau standard dari UMKM yang individu bekerja (Aribawa, 2016: 2).

Kinerja UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 mengenai UMKM, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorang atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriterianya usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang bukan merupakan anak UMKM atau bukan cabang UMKM yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak UMKM atau bukan cabang UMKM yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.

Dengan berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang Undang No 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

- 3 Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 4 Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

2.1.3.2 Tujuan UMKM

Dalam perekonomian sebuah negara UMKM menjadi salah satu penopang perkembangan ekonomi kreatif sebuah negara. Pada kenyataannya menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Tujuan UMKM sendiri yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Sedangkan menurut Bank Indonesia, UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.

2.1.3.3 Kendala UMKM

Terdapatnya kendala menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) Berikut ini beberapa kendala hambatan yang sering muncul dalam UMKM:

1. Internal
 - a. Modal
 - 1) Sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan

perbankan

- 2) Diantara penyebabnya, hambatan geografis. Belum banyak perbankan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian kendala administratif, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan *quality control* terhadap produk. Kemampuan membaca kebutuhan pasar masih belum tajam, sehingga belum mampu menangkap dengan cermat kebutuhan yang diinginkan pasar.
- 2) Pemasaran produk masih mengandalkan cara sederhana *mouth to mouth marketing* (pemasaran dari mulut ke mulut).
- 3) Dari sisi kuantitas, belum dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja karena keterbatasan kemampuan menggaji.

c. Hukum

Pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan hukum perorangan.

d. Akuntabilitas

Belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

2. Eksternal

a. Iklim usaha masih belum kondusif.

- 1) Koordinasi antar stakeholder UMKM masih belum padu. Lembaga

pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keuangan, dan asosiasi usaha lebih sering berjalan masing-masing.

- 2) Belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi atau usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk UMKM.

b. Infrastruktur

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi.
- 2) Kebanyakan UMKM menggunakan teknologi yang masih sederhana.

c. Akses

- 1) Keterbatasan akses terhadap bahan baku, sehingga seringkali UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah.
- 2) Akses terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh UMKM atau grup bisnis tertentu.
- 3) Belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah, terutama bagi UMKM yang sudah mampu menembus pasar ekspor, sehingga sering terlibas dengan UMKM yang bermodal lebih besar.

2.1.3.4 Pengukuran Kinerja

Di dalam sebuah UMKM sistem kinerja yang baik berjalan sesuai apa yang diharapkan untuk mencapai hasil yang maksimal tentu diperlukan pengukuran kinerja yang baik.. Selain itu ada pun manfaat dari *balanced scorecard* yaitu sebuah sistem pengukuran menjadi sebuah sistem manajemen.

Maka di berbagai UMKM menerapkan metode tersebut yang dapat digunakan sebagai berikut :

1. Mengklarifikasikan dan menghasilkan *consensus* mengenai strategi.
2. Mengkomunikasikan strategi ke seluruh UMKM.
3. Menyelaraskan berbagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi UMKM.
4. Mengaitkan berbagai tujuan strategis dengan sasaran jangka panjang dan anggaran tahunan.
5. Mengidentifikasi dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis.
6. Melaksanakan peninjauan ulang strategis secara periodic dan sistematis.
7. Mendapatkan umpan balik yang di butuhkan untuk mempelajari dan memperbaiki strategi.

2.1.3.5 Indikator Kinerja UMKM

Indikator kinerja UMKM dibagi menjadi beberapa bagian adalah sebagai berikut (Norton, 2017):

1. Keuangan yang menunjukkan apakah perencanaan dan melaksanakan strategi memberikan perbaikan dan mendasar, yang tercermin dalam sasaran yang berhubungan dengan keuntungan yang terukur dan pertumbuhan usaha.
2. Pelanggan menjabarkan ukuran kepuasan pelanggan, sebab pelanggan merupakan asset terbesar dalam upaya UMKM memperoleh laba.
3. Proses bisnis internal yaitu mengidentifikasi berbagai proses bisnis yang harus dikuasai dengan baik oleh UMKM.
4. Pembelajaran dan pertumbuhan berfokus pada kemampuan sumber daya

manusia, didalam hal ini yaitu karyawan, karena karyawan yang bertugas melayani dan memuaskan pelanggan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Di bawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM. Penelitian ini digunakan untuk mendukung hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Husnul, Akhiar (2021) Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap kinerja umkm kecamatan kuantan tengah kabupaten singingi	Sama sama meneliti tentang Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap kinerja umkm	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada pengumpulan data yang terdapat pada penelitian terdahulu, peneliti menggunakan probability sampling Dan menggunakan simple random sampling	Variabel inklusi keuangan memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM, literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM	Jurnal Bisnis, Vol. 1, No. 1 Maret 2021, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2.	Nur, Indriyati (2020) Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap kinerja batik di kabupaten tegal	Sama sama meneliti tentang Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap kinerja umkm	Perbedaan terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu di lakukan di Kabupaten Tegal sedangkan penelitian di lakukan di Kota Tasikmalaya, peneliti teknik sampel probability sampling Dan menggunakan simple random sampling	Inklusi keuangan dan literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM Batik di Kabupaten Tegal	Jurnal Ekonomi, Vol. 1, No. 2. Universitas Pancasakti Tegal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Rossy, Wulandari	Penelitian	Perbedaan penelitian	Inklusi	Jurnal Among

	(2019) Pengaruh Literasi Keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja umkm (studi kasus pada umkm provinsi dki jakarta)	terdahulu dengan penelitian sama-sama menggunakan Metode penelitian kuantitatif	terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu di lakukan di Provinsi DKI Jakarta sedangkan penelitian di lakukan di Kota Tasikmalaya, peneliti menggunakan probability sampling dan menggunakan simple random sampling	keuangan dan literasi keuangan masing-masing berpengaruh terhadap kinerja UMKM	Makarti Vol.14 No. 2 – Tahun 2019
4.	Milzam, Kasfy nasution (2019) Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Kasus Pedagang Di Kecamatan Medan Johor)	Sama sama meneliti seputaran Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap kinerja umkm	Teknik pengambilan sampel dalam penelitian terdahulu adalah sampling incidental, sedangkan peneliti menggunakan probability sampling dan menggunakan simple random sampling	Inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM	Jurnal Bisnis, Vol. 1, No. 1
5.	Salsabila, Dinda Rindiani (2021) Pengaruh Literasi Keuangan, <i>Financial</i> <i>Technology</i> dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kota Kupang	Sama sama meneliti seputaran Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap kinerja umkm Metode penelitian kuantitatif.	Teknik pengambilan sampel, jumlah sampel, subjek penelitian, peneliti menggunakan probability sampling dan menggunakan simple random sampling	Literasi keuangan berpengaruh terhadap Kinerja UMKM. Inklusi keuangan memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM	Artikel Ilmiah Perbanas, Vol. 1, No. 1
6	Mei Ruli Ninin (2021) Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah	Sama sama meneliti seputaran Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap kinerja umkm.	Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu, jumlah sampel, subjek penelitian, menggunakan alat analisis partial least square, peneliti menggunakan probability sampling dan menggunakan simple random	Inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Sedangkan literasi keuangan memiliki pengaruh yang terhadap kinerja UMKM	Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen P- ISSN: 2303- 2065 E-ISSN: 2502-5430 Volume 10 No 1 (2021)

2.3 Kerangka Pemikiran

Financial enviroment pelaku UMKM khususnya Bordir tentu saja banyak mendapat dukungan dari pihak eksternal khususnya dari segi pembiayaan, namun dari pembiayaan tersebut dibutuhkan sebuah *financial information system* yang mendukung akan pertimbangan keuangannya, sehingga pelaku UMKM mampu memutuskan akan keputusan keuangan akan pembiayaan yang menguntungkan.

Kinerja UMKM menjadi ukuran keberhasilan sebuah usaha. Kinerja UMKM adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu Hasibuan dalam (Dinar 2017: 9). Indikator kinerja UMKM adalah keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran dan pertumbuhan. Adapun faktor yang mampu mempengaruhi kinerja UMKM adalah Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (Kaplan & Norton, 2017: 75).

Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja UMKM adalah Literasi Keuangan. Literasi Keuangan merupakan kemampuan dalam mengelola uang menganalisis, membaca, dan komunikasi tentang pengalokasia pada sumber daya keuangan guna mencapai tingkat kesejahteraan dan pengambilan keputusan ekonomi secara tepat (Shaari, et al, 2013: 280). Adapun indikator literasi keuangan diantaranya pengetahuan dasar pengelolaan keuangan, Tabungan, asuransi, investasi (Mendari dan Kewal, 2013: 43).

Pengaruh Literasi Keuangan terhadap kinerja UMKM bahwa diperlukan cara strategis guna meningkatkan kinerja salah satunya adalah dengan Literasi

Keuangan. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keyakinan dan keterampilan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka kesejahteraan (Aribawa, 2016: 75). Literasi keuangan memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan kinerja UMKM, semakin baik literasi keuangan yang dimiliki pelaku UMKM maka akan semakin tinggi pula pertimbangan pelaku usaha dalam memutuskan sesuatu misalnya keputusan meminjam, investasi dan lainnya yang berdampak pada kenaikan kinerja UMKM (Aribawa, 2016: 75). Hasil penelitian menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja UMKM. Hasil ini sejalan dengan penelitian Husnul (2021), Nur (2020) dan Rossy (2019) menyatakan bahwa Literasi Keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja UMKM adalah Inklusi Keuangan. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 tentang Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, inklusi keuangan ialah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan Inklusi Keuangan yaitu ketersediaan/ akses, penggunaan, kualitas dan kesejahteraan (Bank Indonesia, 2014).

Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap kinerja UMKM bahwa pada pertumbuhan kinerja UMKM masyarakat memiliki kesempatan usaha yang luas

tetapi pengusaha UMKM masih sulit dalam mengembangkan usaha dikarenakan kesulitan di modal. Dengan itu cara mengatasinya dengan menerapkan Inklusi Keuangan. Semakin baik akses yang diberikan untuk usaha, maka proses usaha akan semakin baik dalam meningkatkan keuntungannya (Yanti, 2019: 8). *Center for* Inklusi Keuangan dalam Gonzales (2011) mendefinisikan bahwa Inklusi Keuangan merupakan akses terhadap produk keuangan yang sesuai diantaranya kredit, tabungan, pembayaran juga asuransi, sehingga terjadinya akses yang berkualitas dengan kesesuaian dan memperhatikan konsumen, dengan ketersediaan yang juga diberikan kepada semua orang. Inklusi Keuangan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Inklusi keuangan sangat berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian Nasution (2019) dan Salsabila (2021) menyatakan terdapat pengaruh antara Inklusi Keuangan dengan kinerja UMKM.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara hasil penelitian. Berdasarkan paparan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

- H1 Literasi Keuangan Berpengaruh Terhadap Kinerja UMKM Kota Tasikmalaya
- H2 Inklusi Keuangan Berpengaruh Terhadap Kinerja UMKM Kota Tasikmalaya
- H3 Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Berpengaruh Terhadap Kinerja UMKM Kota Tasikmalaya